

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Krisis Semenanjung Krimea pada mulanya dipicu oleh konflik yang terjadi di Ukraina pada November 2013 akibat dari keputusan Viktor Yanukovich yang menolak penandatanganan pakta kerjasama *Ukraine Association Agreement* yang akan dijadwalkan pada pertemuan Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lithuania. (VOA Indonesia, 2013) Langkah tersebut membuat rakyat yang pro terhadap KTT Kemitraan Uni Eropa menentang keputusan Viktor Yanukovich karena telah menggagalkan upaya kerjasama yang sebelumnya sudah diinisiasi oleh Viktor Yushchenko dalam bentuk *Deep Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)* atau Perjanjian Asosiasi dan Zona Perdagangan Bebas Mendalam-Komprehensif. Setelah menolak kesepakatan tersebut, Viktor Yanukovich lebih memilih untuk menandatangani 14 naskah kerjasama *Joint Action Plan* dengan Rusia dalam persidangan ke-6 Komite Kerjasama Antar-Pemerintah Rusia-Ukraina pada 17 Desember 2013 di Moskwa, Rusia. (VOV, 2013) Keputusan Yanukovich yang lebih pro terhadap Rusia dibanding Uni Eropa serta adanya tindakan dan kebijakan represif kepada penentang Yanukovich menimbulkan gelombang aksi protes yang lebih besar bahkan sejak Ukraina merdeka pada 1991, (Solonenko, 2015) tidak hanya dari luar pemerintahan namun juga dari dalam pemerintahan yang menyebabkan dinamika politik dan pemerintahan Ukraina menjadi semakin tidak stabil. Pada 22 Februari 2014, Viktor Yanukovich pada

akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden oleh parlemen Ukraina dan dinyatakan sebagai buronan pemerintah Ukraina pada 24 Februari 2014.

Serangkaian konflik yang terjadi di ibukota Ukraina menciptakan gelombang perpecahan baru di wilayah Ukraina Timur dan Ukraina Selatan yang mayoritas penduduknya merupakan penutur Rusia dan pendukung Viktor Yanukovych. Perpecahan tersebut kemudian semakin berkembang ke berbagai kota ditandai dengan munculnya konflik terbuka antara demonstran pro pemerintahan baru Ukraina dengan demonstran pro Rusia. (Ramicone, 2014) Pada 27 Februari 2014, demonstran pro Rusia berhasil menguasai gedung parlemen Krimea dan mengibarkan bendera Rusia, mereka meminta kepada pemerintah Republik Otonom Krimea agar segera membuat referendum untuk menjadi bagian dari Federasi Rusia. Setelah insiden tersebut, kemudian terjadi serangkaian pengambil alihan instansi pemerintahan dan sarana umum oleh kelompok pemberontak bersenjata tidak dikenal yang diantaranya diakui Rusia sebagai personil militer mereka yang tidak berencana. Langkah yang diambil oleh Rusia dengan melakukan dukungan secara terbuka kepada milisi pro Rusia di wilayah Krimea diklaim Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan politik dan keamanan kepada penutur Rusia yang berada di Krimea. Pada 16 Maret 2014, melalui referendum reunifikasi yang diikuti oleh 1.274.096 pemilih, menunjukkan bahwa 96,77 persen penduduk Krimea memutuskan untuk menjadi bagian dari Federasi Rusia. (News, Russian Today, 2014) Pada 21 Maret 2014 dengan meninjau dan mempertimbangkan pengajuan surat permohonan

reunifikasi oleh pemerintah Republik Otonom Krimea, Konstitusi Federal Hukum Pemerintah Rusia secara resmi memutuskan untuk menjadikan status kedaulatan wilayah Krimea sebagai bagian dari Federasi Rusia. (Georgievsk, 2015)

Peristiwa tersebut kemudian direspon dunia internasional sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap konflik internal di Ukraina. Tindakan ekstrim yang dilakukan oleh Rusia di Semenanjung Krimea juga meningkatkan kewaspadaan negara-negara Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia yaitu Estonia, Latvia dan Lithuania akan semakin berkembangnya potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan negaranya. Lebih lanjut, Jakniunaite mengutip pernyataan Ulman mengenai definisi ancaman bagi keamanan suatu negara sebagai tindakan atau serangkaian peristiwa yang terjadi secara drastis dan dalam waktu yang singkat dapat mengancam atau menurunkan kualitas hidup penduduk suatu negara serta mempersempit pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah dan non-pemerintah didalam negara. (Ulman, 1983) Jika dikorelasikan dengan pernyataan tersebut, aktivitas Rusia di Semenanjung Krimea dapat diidentifikasi sebagai suatu bentuk ancaman yang tidak hanya berfokus pada kekuatan militer tapi juga cara-cara non-militer dan paramiliter, Rusia dianggap sedang menggunakan strategi perang hibrida atau perang campuran dalam memproyeksikan kepentingannya untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Baltik, khususnya di negara-negara bekas Soviet. Pengimplementasian perang hibrida oleh Rusia terlihat jelas jika kita melihat bagaimana peran Rusia di konflik Ukraina dan berbagai macam intervensi Rusia di

negara-negara Baltik dengan menggunakan perpaduan kapasitas ketahanan nasional sebuah negara mulai dari kapasitas militer secara konvensional yang mencakup intelejen, dukungan terhadap pemberontak lokal, pengerahan personil militer gerilya dan penerjunan personil militer khusus hingga agitasi, propaganda dan mengeksploitasi “potensi konflik” pada populasi target. Strategi perang ini berbeda dengan strategi perang konvensional karena bersifat multidimensi, asimetris dan menciptakan kerentanan jangka panjang. Pendekatan perang hibrida diproyeksikan mampu menciptakan medan operasi militer pada wilayah target di masa damai yang dapat dikontrol sebagai ruang operasional apabila di masa mendatang konflik yang sebenarnya terjadi. Strategi perang seperti ini dapat melemahkan target tanpa harus melakukan konfrontasi secara terbuka. (Tulak, 2016)

Di sisi lain, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Rusia di Eropa Timur jika dikalkulasi menggunakan pertimbangan strategis dapat diartikan sebagai suatu upaya defensif yang ditujukan untuk menangkal pengaruh perluasan NATO di Eropa Timur. Sejak 1991, setelah Uni Soviet bubar, Amerika Serikat dan NATO secara aktif melakukan pendekatan kepada negara-negara bekas Uni Soviet untuk meningkatkan kekuatan aliansi serta meningkatkan kontrol terhadap negara-negara di Eropa Timur. Secara geostrategis, bergabungnya negara-negara bekas Uni Soviet ke NATO dapat memperkuat pertahanan aliansi dan sekutu Amerika Serikat dengan menerapkan kombinasi sistem pertahanan depan dan peletakan sistem persenjataan strategis sehingga NATO dapat menempatkan *Grounded-Launched Cruise Missile* yang dapat

menjangkau Rusia. Oleh karena itu, secara rasional sangat wajar apabila Rusia geram dan selalu berupaya untuk menetralkan pengaruh NATO di Eropa Timur.

Manuver taktis yang ditunjukkan Rusia membuat ketiga negara Baltik khawatir akan ancaman dan potensi destabilisasi yang ditimbulkan terhadap keamanan kawasannya sehingga perlu adanya upaya bersama untuk mengusahakan proses sekuritisasi dari potensi ancaman yang dilakukan oleh Rusia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini kemudian dibuat dengan menawarkan analisis dan bahasan yang berfokus pada strategi negara-negara Baltik dalam menyikapi keamanan kawasannya terhadap Rusia pasca konflik Krimea. Terdapat beberapa penelitian yang menuliskan permasalahan serupa antara lain : *Respon Negara-Negara Baltik Terhadap Ancaman Rusia Pasca Aneksasi Crimea* yang ditulis oleh Ariski Aznor (2018), menjelaskan respon negara-negara Baltik terhadap ancaman Rusia pasca aneksasi Krimea. Penelitian lain yang ditulis oleh Syafitri Ramadhani (2019) dengan judul *Reaksi Ofensif Rusia Dalam Menghadapi NATO Pasca Konflik Krimea Tahun 2014-2017*, menjelaskan mengenai reaksi ofensif Rusia terhadap NATO yang secara aktif memperkuat aliansinya di Eropa Timur khususnya melalui negara-negara Baltik. (Ramadhani, 2019) Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melihat bahwa terdapat kebaharuan substansi dari penelitian *Strategi Negara-negara Baltik Dalam Menyikapi Keamanan Kawasan Terhadap Rusia Pasca Konflik Krimea* karena penelitian ini berfokus untuk meneliti strategi yang digunakan oleh negara-negara

Baltik dalam menghadapi potensi ancaman yang ditimbulkan dari meningkatnya agresivitas Rusia pasca konflik Krimea.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi negara-negara Baltik dalam menyikapi keamanan kawasan terhadap Rusia pasca konflik Krimea ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai konflik yang terjadi antara negara-negara Baltik dengan Rusia sebagai negara yang berdampingan ditengah kondisi geopolitik dan geostrategis yang kompleks.

### **2. Tujuan Khusus**

Penelitian ini diharapkan mampu membantu penstudi ilmu Hubungan Internasional dalam menyusun dan mengembangkan penelitiannya khususnya yang berkaitan dengan dinamika konflik kawasan Baltik dan strategi negara-negara Baltik dalam menyikapi keamanan kawasan terhadap Rusia pasca konflik

Krimea. Bagi kalangan umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan dalam memahami fenomena hubungan internasional.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Untuk selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi studi bidang keilmuan Hubungan Internasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu membantu penstudi ilmu Hubungan Internasional dalam menyusun dan mengembangkan penelitiannya khususnya yang berkaitan dengan dinamika konflik kawasan Baltik dan strategi negara-negara Baltik dalam menyikapi keamanan kawasan terhadap Rusia pasca konflik Krimea. Bagi kalangan umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan dalam memahami fenomena hubungan internasional.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, diperlukan kerangka berpikir yang digunakan untuk membantu penulis dalam menjelaskan fenomena yang ada. Lebih lanjut, kerangka berpikir dapat menjadi acuan

dan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian supaya nantinya dapat memenuhi prosedur ilmiah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori *Regional Security Complex (RSCT)* atau teori kompleks keamanan kawasan yang didefinisikan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam buku *Regions and Powers: The Structure of International Security* (2003).

Teori ini menjelaskan mengenai relasi dan interaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih aktor yang berada dalam satu ruang lingkup geografis terbatas karena memiliki keterkaitan masalah keamanan yang terkoneksi dan tidak dapat ditangani atau diekstraksi secara independen sehingga membuat tingkat interdependensi keamanan antar aktor didalamnya menjadi lebih intens dibandingkan dengan aktor yang berada diluar kawasan. Lebih lanjut, dalam teorinya, Barry Buzan dan Ole Waever mendefinisikan kawasan sebagai suatu subsistem yang signifikan dan berbeda dari hubungan antar aktor yang memiliki kedekatan geografis. Meskipun berfokus pada keamanan aktor kawasan, dalam penerapannya, cakupan analisa dari teori ini juga mengikut sertakan kehadiran dan kontribusi aktor-aktor eksternal karena dianggap dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam membentuk arsitektur keamanan kawasan. Dalam kajian hubungan internasional yang berfokus pada dinamika kawasan, RSCT telah menjadi teori penting yang dapat digunakan untuk membaca fenomena dan pergeseran yang terjadi pada skala kawasan maupun sub-kawasan. Objek yang dikaji pada teori ini juga tidak hanya berfokus pada negara sebagai aktor utama tetapi juga aktor non-negara.

Menurut RSCT, konflik yang terjadi pada masa Perang Dingin dan pasca-Perang Dingin membuat konsep regionalisme menjadi semakin berkembang karena secara langsung berpengaruh pada persepsi dan pola interaksi antar aktor yang berada pada satu kawasan sehingga menciptakan dinamika Amity/Enmity sebagai karakter dari kompleksitas keamanan. Barry Buzan membagi hubungan antar aktor menjadi dua pola yaitu Amity dan Enmity yang dibangun atas beberapa faktor, seperti sejarah, sosial, budaya hingga geopolitik. Amity merupakan pola interaksi yang terjalin atas dasar kesamaan persepsi dan orientasi yang membuat iklim hubungan antar aktor menjadi saling melengkapi, mendukung dan melindungi. Sedangkan Enmity merupakan pola interaksi yang didasarkan pada sentimen permusuhan, kecurigaan dan kekhawatiran akan ancaman dari aktor terdekat.

Menurut Barry Buzan terdapat empat poin esensial yang harus diperhatikan ketika mengidentifikasi pola dan struktur utama dalam kompleksitas keamanan kawasan. Pertama, adanya batasan (*boundary*) yang menjadi pembeda antara kompleksitas keamanan kawasan yang satu dengan yang lainnya. Kedua, kompleksitas keamanan kawasan harus memiliki struktur anarki yang tersusun oleh lebih dari dua aktor otonom. Ketiga, terdapat polarisasi yang menciptakan distribusi kekuasaan dan kekuatan. Keempat, kompleksitas keamanan kawasan diciptakan oleh serangkaian fenomena yang dikonstruksi oleh hubungan antar aktor didalamnya. RSCT memadukan asumsi mengenai *material power* yang terdapat pada neorealisme serta konstruksi sosial dalam konstruktivisme. RSCT menganggap identitas dari aktor

kawasan merupakan unsur penting yang menggambarkan adanya relevansi antara filosofi-historis yang melatarbelakangi perilaku dengan orientasi dari suatu negara dalam berinteraksi. (Buzan & Woever, *Regions and Powers : The Structures of International Security*, 2003)

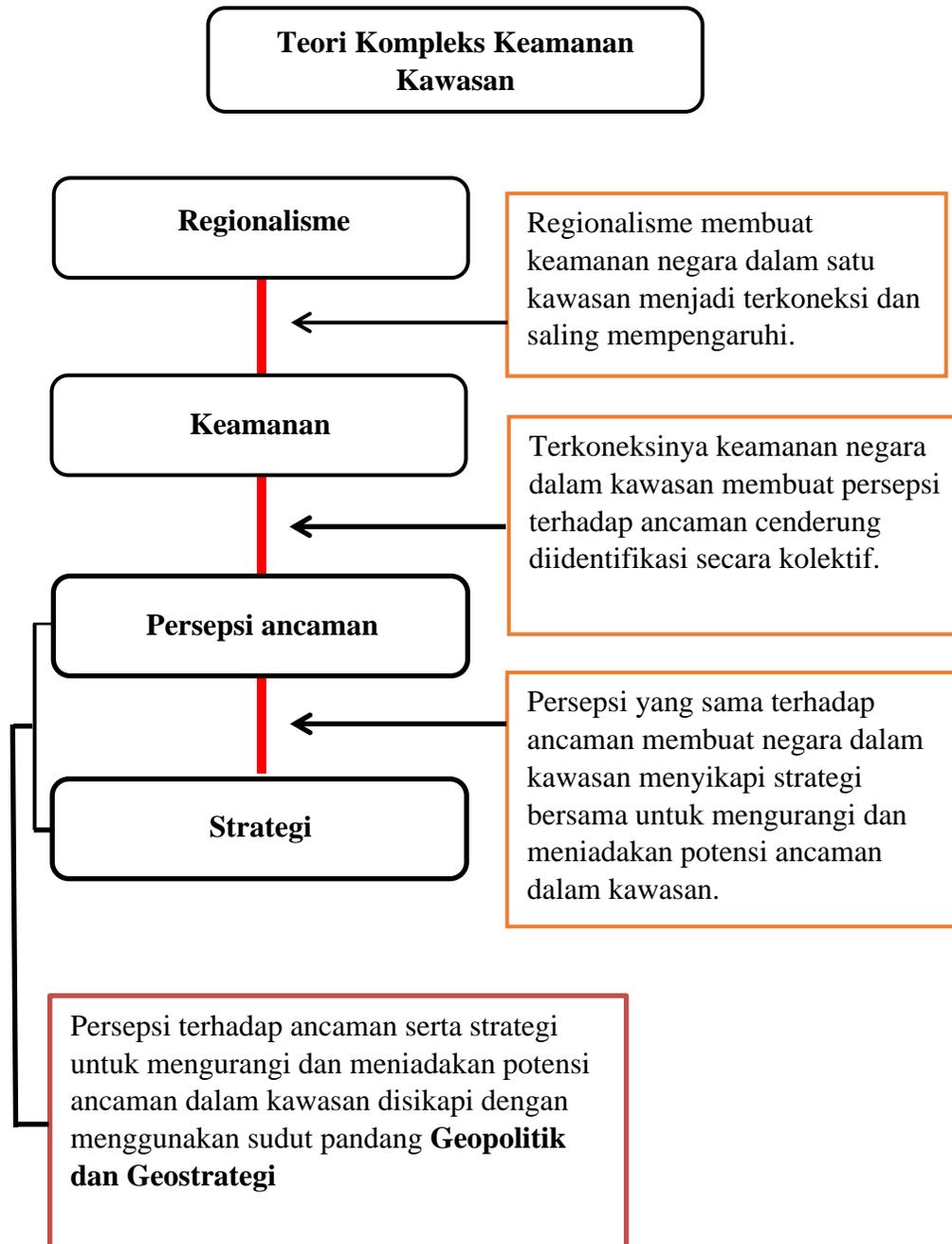
Dalam kompleksitas keamanan kawasan, polaritas menghasilkan distribusi kekuasaan dan kekuatan yang terbagi menjadi empat tipe :

1. *Standart*, polaritas yang terbentuk pada tipe ini akan bergantung pada *regional power*.
2. *Centerred*, polaritas yang terbentuk pada tipe ini bersifat unipolar dan bergantung pada aktor dominan sebagai pusatnya. Tipe ini secara lebih spesifik dibagi menjadi empat diferensiasi :
  - *super power*, struktur ini berpusat pada negara adidaya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memproyeksikan serta mendominasi kekuasaan global.
  - *great power*, struktur ini berpusat pada negara yang memiliki kekuatan besar tetapi pengaruh dan kekuasaannya belum mampu mencapai skala global.
  - *regional power*, struktur ini berpusat pada negara yang memegang hegemoni kawasan.

- *Institutional*, struktur unipolar yang dipengaruhi oleh kehadiran institusi non-negara.
3. *Great Power*, polaritas yang menjadikan *great powers* sebagai kutub yang memiliki peran signifikan dinamika dalam kawasan.
  4. *Supercomplexes*, terdapat keterikatan dinamika keamanan interregional yang disebabkan oleh *spillover effect* dari *great power* terhadap lintas kawasan. (Buzan & Woever, *Regions and Powers : The Structures of International Security*, 2003)

Dalam pengaplikasiannya, RSCT dapat dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan kompleksitas keamanan kawasan secara deskriptif dan prediktif. Secara deskriptif, RSCT mampu menganalisa suatu fenomena secara sistematis dan terorganisasi sehingga antara struktur pertanyaan yang dibangun dengan konsep yang dipakai dapat dihubungkan secara koheren. Oleh karena itu, RSCT deskriptif dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan holistik dalam menjelaskan sebuah kompleksitas keamanan. Selain itu, RSCT juga memiliki kegunaan secara prediktif untuk memahami transformasi dan perubahan fenomena yang terjadi sehingga skenario dan kemungkinan dalam sebuah kompleksitas keamanan dapat dibaca dengan suatu kerangka berpikir yang konseptual. (Buzan & Woever, *Regions and Powers : The Structures of International Security*, 2003)

## 1.6 Operasionalisasi Konsep



## 1.6.1 Definisi Konseptual

### 1.6.1.1 Regionalisme

Menurut E. D. Mansfield dan H. V. Milner, definisi dari regionalisme dalam hubungan internasional dibagi menjadi dua jenis, yaitu regionalisme yang didasarkan pada kedekatan geografis dan regionalisme yang tidak didasarkan pada kedekatan geografis. (Mansfield & Milner, 1999) Berbeda dengan regionalisasi yang lebih menekankan pada proses ekonomi, regionalisme dibangun oleh proses politik yang umumnya berlandaskan pada keserasian identitas, tujuan maupun permasalahan yang menggerakkan aksi kolektif secara komprehensif dan berkelanjutan. Bentuk interaksi dari regionalisme dibangun oleh hubungan kerjasama antar negara atau non-negara yang bersifat formal. Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, konsep regionalisme secara tradisional (*old regionalism*) muncul pada tahun 1950-an ketika aliansi keamanan dan integrasi ekonomi mulai dirumuskan. Menurut Ferrel, munculnya *old regionalism* dipengaruhi oleh proses yang terjadi selama perang dingin. Seiring dengan interaksi yang semakin kompleks antar anggota dalam kawasan, pada tahun 1980-an terjadi pembaharuan konsep regionalisme yang dikenal sebagai regionalisme baru (*new regionalism*) ditandai dengan perluasan fokus dan ruang lingkup hubungan kerjasama, mencakup sosial, politik ekonomi, keamanan, lingkungan hingga pembangunan kawasan. (Ferrell, 1999)

### 1.6.1.2 Persepsi Ancaman

Ancaman (*threat*) terhadap suatu negara dapat berasal dari aktor negara maupun non-negara yang ditujukan untuk melemahkan atau menciptakan destabilisasi pada keamanan nasional (*national security*). Pasca Perang Dingin, definisi ancaman menjadi semakin meluas dan bersifat multidimensi. Hal tersebut membuat ancaman tidak hanya dipersepsikan melalui aktivitas militer namun juga aktivitas non-militer. Sumber ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari luar (*external*) dan ancaman dari dalam (*internal*). Dalam kajian yang lebih luas, ancaman dibagi menjadi dua kategori, yaitu ancaman terhadap personal atau individu dan ancaman terhadap kumpulan individu yang bersifat kolektif. (Michael B. MacKuen, 1992) Ancaman yang bersifat kolektif secara umum telah menjadi fokus dari Hubungan Internasional karena menyangkut berbagai macam aspek yang harus dikaji secara komprehensif.

Menurut Robert O. Tilman, persepsi ancaman merupakan persepsi atau respon yang diambil suatu negara terhadap potensi ancaman dari negara lain. Tilman membagi persepsi ancaman secara umum menjadi lima dimensi, yaitu, geopolitik, struktur, sosio-budaya, sejarah, dan ekonomi. (Tilman, 1987) Menurut Stephen Walt, sumber ancaman dapat diidentifikasi melalui 4 faktor utama yang paling berpengaruh. Pertama *geographic proximity*, suatu negara dapat mengidentifikasi suatu ancaman dengan mengukur perhitungan jarak antara negara tersebut dengan sumber ancaman. Kedua *perceived intentions*, peningkatan

agresivitas sumber ancaman dianggap sebagai peningkatan terhadap potensi ancaman. Ketiga *offensive power*, semakin besar kapabilitas militer suatu negara maka akan meningkatkan kemungkinan bagi negara tersebut untuk melakukan tindakan ofensif terhadap negara lain. Keempat *aggregate power*, peningkatan sumber daya negara lain dapat dianggap sebagai peningkatan terhadap kekuatan sumber ancaman. (Walt, 1987)

### **1.6.1.3 Keamanan**

Pasca perang dingin, konsep keamanan semakin berkembang menjadi isu dominan yang merujuk pada kerentanan suatu entitas terhadap ancaman. Secara interpretatif, bentuk dari ancaman dapat berupa ancaman militer maupun non-militer Menurut Barry Buzan dan Lene Hansen dalam *The Evolution of International Security Studies*, keamanan merupakan suatu upaya untuk mengurangi atau meniadakan ancaman. (Buzan & Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, 2009) Objek dari keamanan (*referent object*) dapat berupa individu, kelompok, lingkungan hingga negara. Semakin bervariasinya ancaman membuat konsep dan studi keamanan mengalami evolusi yang dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu *institutionalization*, *great power politics*, *event*, *technology*, dan *academic debate*. (Buzan & Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, 2009) Berdasarkan batasan tertentu, seperti teritorial misalnya, ancaman terhadap keamanan dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar.

#### **1.6.1.4 Strategi**

Konsep mengenai strategi secara historis diambil dari istilah Yunani '*stratēgos*' yang berarti komandan militer. Konsep ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan serangkaian rencana, intruksi dan keputusan yang diambil demi memenangkan peperangan. Meskipun berhubungan dengan dunia militer, strategi juga dapat diaplikasikan ke berbagai bidang karena tidak ada batasan-batasan yang spesifik dalam penggunaannya. J. C Wylie mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana atau aksi yang ditunjukkan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam *The Strategy of Conflict* karya Thomas Schelling, strategi memiliki beberapa unsur umum sebagai prinsip yang harus dipahami ketika merumuskan strategi. Pertama, identifikasi ancaman (*threats*). Kedua, tawar menawar (*bargaining*). Ketiga, membangun kepercayaan dalam kerjasama (*mutual distrusts*). Keempat, keseimbangan antara kerjasama dan konflik. (Schelling, 1960) Dalam keadaan konflik, strategi berfungsi sebagai *management instrument* yang mengatur rencana secara komprehensif untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumberdaya dan kapabilitas yang seefektif dan seefisien mungkin.

#### **1.6.1.5 Geopolitik**

Geopolitik pada dasarnya tidak memiliki definisi yang spesifik karena pemaknaan dari konsep geopolitik seringkali diinterpretasikan secara berbeda seiring dengan pergantian periode sejarah dan struktur tatanan dunia. Menurut *Foundations for a System of Politics* (1920), geopolitik dapat

diterjemahkan sebagai suatu konsep yang mengkaji mengenai hubungan antara situasi politik, sumber daya, kondisi dan bentuk spasial dari suatu wilayah. Saat ini, kata “Geopolitik” seringkali digunakan oleh pengamat, penulis dan praktisi hubungan internasional dalam menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di dunia internasional sehingga membuat geopolitik dapat dijadikan sebagai alat untuk melihat suatu fenomena internasional. Bernard Cohen dalam *Geopolitics: The Geography of International Relations* memahami geopolitik sebagai suatu alat bantu dalam menganalisis interaksi antara proses politik dan faktor geografis. (Cohen, 2009) Proses politik dipahami sebagai suatu eksistensi aktivitas dan kekuatan dari berbagai elemen yang memainkan peran dalam dinamika politik, baik di kancah domestik maupun internasional. Sedangkan, Faktor geografis umumnya meliputi kondisi dan bentuk geografis. Dalam cakupan wilayah yang terbatas, pertemuan kepentingan geopolitik antara dua entitas dapat menciptakan peningkatan hubungan diplomatis dan kerjasama maupun konflik dan persaingan. Hal tersebut bergantung pada dinamika proses politik dari entitas yang bersinggungan. Dalam dunia modern, geopolitik identik dengan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan.

#### **1.6.1.6 Geostrategi**

Sejak awal kemunculannya, geostrategi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memproyeksikan strategi atau taktik dalam situasi konflik atau peperangan yang melibatkan pertimbangan faktor geografis. Frederick

L. Schuman sebagai penulis dari *Let Us Learn Our Geopolitics* menerjemahkan buku *Wehr Geopolitik* karya Jenderal Karl Haus-hofer sebagai tulisan yang paling relevan dalam menjelaskan konsep geostrategi secara mendasar dimana geografi merupakan aspek penting yang mempengaruhi kekuasaan. Buku tersebut juga menjelaskan bahwa dalam menunjang kekuasaan, ilmu militer harus mengadopsi pendekatan secara politik dan juga geografi. Hal tersebut berguna untuk menjaga stabilitas keamanan dan kelangsungan suatu negara dalam menghadapi musuh baik pada masa damai maupun perang sebagai suatu bentuk antisipasi dan kewaspadaan. Oleh karena itu, geostrategi memegang tiga prinsip dasar. Pertama, *continous*, dimana dalam mempertahankan kedaulatan serta keberlansungannya, suatu negara memerlukan strategi nasional yang dapat terus beradaptasi secara berkelanjutan. Kedua, *restless*, dimana negara perlu memiliki perasaan resah dan terjaga terhadap segala potensi ancaman melalui instrumen militer maupun non-militer baik yang terprediksi maupun yang tidak. Ketiga, *relentless*, negara perlu memaknai bahwa segala bentuk potensi ancaman harus segera ditiadakan tanpa belas kasihan.

Dalam konteks yang lebih luas, bahasan geostrategi juga mengikutsertakan berbagai macam pertimbangan, seperti distribusi daratan dan perairan, akses, jarak, perencanaan strategis, situasi politik, dan kendali resiko ancaman maupun serangan. Dalam sistem pertahanan negara, geostrategi memiliki peranan penting sebagai acuan suatu negara dalam menyusun postur dan arah gerak militernya, seperti halnya yang terjadi diperbatasan atau daerah rawan konflik.

Oleh karena itu, suatu negara dituntut untuk mampu memahami peta kekuatan lawan secara geostrategis. Salah satu kekalahan dalam Perang Dunia II yang memalukan adalah gagalnya operasi Barbarossa atau lebih dikenal sebagai agresi militer Jerman atas Uni Soviet pada 1941. Jika dilihat dari perimbangan persenjataan dan peralatan perang, Jerman dapat dikatakan lebih unggul, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kemenangan Jerman pada awal operasi dengan strategi *Blitzkrieg* atau serangan kilatnya namun pada akhirnya harus gagal karena Jerman tidak mampu memproyeksikan hambatan geografis dari wilayah Uni Soviet yang luas dan pada waktu itu memasuki musim dingin. Operasi itu membuat Jerman mengalami kerugian yang besar sekaligus membuktikan bahwa faktor geografis dapat memberikan pengaruh yang besar dalam peperangan.

## **1.6.2 Definisi Operasional**

### **1.6.2.1 Regionalisme**

Konsep regionalisme digunakan untuk memahami dan mempelajari hubungan negara-negara Baltik yaitu Estonia, Latvia dan Lithuania. Secara operasional, konsep regionalisme dapat menjelaskan interdependensi dan keterkaitan fenomena dan permasalahan yang dimiliki oleh ketiga negara Baltik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan regionalisme baru (*new regionalism*) sebagai alat analisis karena mampu mencakup berbagai macam dimensi dalam hubungan internasional.

### **1.6.2.2 Persepsi Ancaman**

Konsep persepsi ancaman digunakan untuk menjelaskan interpretasi negara-negara Baltik dalam mengidentifikasi dan menafsirkan ancaman dari Rusia terhadap keamanan nasional maupun kewasannya.

#### **1.6.2.3 Keamanan**

Konsep keamanan digunakan untuk menganalisis segala bentuk kerentanan yang dimiliki negara-negara Baltik terhadap berbagai upaya destabilisasi keamanan yang dilakukan oleh Rusia.

#### **1.6.2.4 Strategi**

Konsep strategi digunakan untuk memahami serangkaian rencana, intruksi dan keputusan yang dilakukan oleh negara-negara Baltik secara kolektif dalam menghadapi Rusia.

#### **1.6.2.5 Geopolitik**

Konsep geopolitik digunakan untuk memahami serta menganalisa peta dan dinamika politik yang sedang berlangsung antara negara-negara Baltik, Rusia, dan faktor-faktor eksternal yang saling mempengaruhi.

#### **1.6.2.6 Geostrategi**

Konsep geoeкономи digunakan untuk memahami peta kekuatan serta aktivitas militer dan aliansi pada aktor-aktor yang terlibat dalam konflik.

## 1.7 Argumen Penelitian

Meningkatnya aktivitas Rusia di Eropa Timur pasca konflik Krimea melalui berbagai macam intervensi serta gangguan yang juga ditujukan kepada negara-negara Baltik yaitu Estonia, Latvia dan Lithuania sebagai anggota NATO membuat ketiga negara tersebut menjadi semakin waspada dan khawatir akan potensi ancaman yang ditimbulkan melalui aktivitas militer maupun non-militer Rusia. Negara-negara Baltik menyadari bahwa kekuatan militernya tidak sebanding dengan Rusia. Oleh karena itu, dalam mempertahankan kawasannya, negara-negara Baltik menggunakan strategi pendekatan regional sebagai upaya untuk mendapatkan keamanan kolektif dari para mitra strategisnya, terutama NATO yang dianggap mampu mengimbangi kapasitas dan kapabilitas militer Rusia. Selain itu negara-negara Baltik juga dapat melakukan berbagai tindakan preventif untuk menghindari terciptanya konflik konvensional, salah satunya melalui Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Melalui OSCE ruang-ruang diplomasi dapat tercipta dan jalur perdamaian yang berimbang antar negara-negara Baltik dengan Rusia sangat mungkin untuk difasilitasi. Namun, ini tidak dapat menjamin ketidakhadiran agresivitas Rusia ke negara-negara Baltik pasca konflik Krimea.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Tipe ini akan berfokus untuk mendeskripsikan fenomena atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti disertai dengan data empiris dan kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori dan konsep untuk menjawab rumusan masalah.

### **1.8.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat diambil dari narasi-narasi, dokumen, gambar dan video yang relevan serta mendukung penelitian.

### **1.8.3 Sumber Data**

Data yang menjadi rujukan dalam menyusun penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber kompeten di bidangnya seperti pengamat yang berfokus pada dinamika di Eropa Timur. Data sekunder diperoleh melalui *desk research*. Studi pustaka yang dijadikan sebagai referensi bersumber dari buku, jurnal ilmiah, situs internet dan makalah penelitian.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif dengan melakukan wawancara dan penelusuran kepustakaan. Teknik penelusuran kepustakaan atau dokumentasi akan digunakan untuk mencari data yang relevan dengan penelitian melalui literatur dan dokumentasi secara online maupun offline.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisis data kualitatif, penulis menggunakan tiga cara, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan serta verifikasi data (*Conclusion Drawing/verification*). Reduksi data merupakan teknik untuk memilih dan memfokuskan pencarian data yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Penyajian data ditujukan untuk memberikan paparan singkat yang bersifat naratif terhadap suatu data. Kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dari analisis data kualitatif untuk mencocokkan hasil reduksi data dengan tujuan penelitian.

#### **1.8.6 Kualitas Data**

Penelitian ini disusun menggunakan data yang diambil dari sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis juga memperhatikan dan memverifikasi setiap data yang digunakan secara objektif supaya layak untuk

dijadikan referensi pada penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berusaha mungkin untuk memakai data yang berkualitas dalam menyusun penelitian ini.